

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia saat ini beragam potensi wisata yang dimiliki mulai dari wisata alam yang sebagian potensi desa dijadikan daya tarik wisata yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga potensi alam dan budaya sangat berdampak positif untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menyebabkan tingkat ketertarikan wisatawan khususnya di mancanegara ini terhadap lingkungan desa yang bernuansa alam. Menurut (Ginting, Wardana, & Zainal, 2020) mendefinisikan potensi merupakan kekuatan dalam bertindak atau kemampuan bakat terpendam yang dimiliki akan tetapi belum dapat dimanfaatkan secara menyeluruh. Sedangkan dalam penelitian potensi lokal adalah “kemampuan/kekuatan/daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau tempat yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi suatu tempat tersebut”.

Ekowisata juga terdapat beberapa aspek yang dimiliki diantaranya memberikan manfaat dalam aspek keberlanjutan kelestarian alam, menambah devisa negara atau perekonomian negara, dan keterbukaan dari masyarakat itu sendiri. Pemendagri (2009) Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah, telah memberikan motivasi kepada pemerintah daerah bahwasanya dalam pengembangan ekowisata sudah menjadi bagian di dalam kepariwisataan Indonesia. Dalam peraturan yang dijelaskan tersebut ekowisata memiliki potensi sumber daya alam, keunikan, lingkungan dan budaya yang menjadi sektor keunggulan suatu daerah yang belum dikembangkan secara optimal.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi di pulau Jawa dengan berbagai potensi yang dimiliki salah satunya desa wisata sampai memasuki kawasan internasional yaitu Desa Wisata Nglanggeran, dan Desa Pentingsari. Selain itu masih banyak desa wisata lainnya yang dapat berpotensi menjadi desa wisata sebagai produk pariwisata. Dimana persoalan permasalahan tata ruang yang ada di Desa Wisata Nglanggeran pemerintah memberikan kepercayaan untuk pengelolaan lahan seluas 48 Ha untuk dikelola oleh pemuda karang taruna Bukit Putra Mandiri hal ini tertuang dalam SK kepala Desa Nglanggeran No. 05/KPTS/1999 tanggal 12 Mei 1999. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 dimana disebutkan dalam misi nomor 3 “mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. sehingga dalam penjabaran tersebut pengembangan pariwisata menjadi hal utama dalam pembangunan di Provinsi Yogyakarta.

Dalam keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 193/KEP/2017 tentang kebijakan strategis pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2025 dijelaskan bahwasanya terdapat 7 destinasi prioritas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU salah satunya yaitu “Kawasan Perbukitan Menoreh” Namun menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 pada bagian isu strategis terdapat permasalahan yang dihadapi bahwa Kabupaten Kulon Progo dalam tingkatan rata-rata jumlah pengunjung paling sedikit dibanding dengan tiga kabupaten lainnya diantaranya Sleman, Bantul, Gunungkidul dengan tingkatan rata-rata sebesar 5,11%. Sehingga dengan menjadikannya kawasan pegunungan menoreh sebagai salah satu prioritas destinasi pariwisata di Yogyakarta hal tersebut diharapkan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan Perda DIY Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) Daerah Istimewa Yogyakarta dijelaskan bahwa rencana

tata ruang kawasan strategis provinsi pada kawasan pegunungan menoreh yang tertuang dalam pasal 80 ayat (3), menunjukkan terdapat 11 desa wisata yang berkembang di kawasan tersebut salah satunya adalah Desa Jatimulyo yang berada pada ketinggian sekitar 500-800 mdpl. Peduduk desa ini sekitar 900 jiwa kawasan perbukitan menoreh tepatnya di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Adapun Desa Wisata lainnya yakni Desa Wisata Banjarsari, Desa Wisata Puwosari, Desa Wisata Sermo Hargowilis, Desa Wisata Purwoharjo, Desa Wisata Kalibiru, Desa Wisata Sidorejo, Desa Wisata Banjaroya, Desa Wisata Tinalah, Desa Wisata Dekso Banjararum, Desa Wisata Nglinggo. Sementara menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kulon Progo Niken Probo Laras mengatakan bahwa dari 11 desa wisata yang di uraikan di atas sudah mulai berkembang dengan baik seiring berjalannya waktu. Selain itu, terdapat desa wisata yang mendapat penghargaan dalam pengelolaan *Community Based Tourism (CBT)*. Hal tersebut menjadi solusi acuan untuk desa wisata lainnya agar bisa lebih berkembang lagi.

Inilah salah satu keuntungan mengembangkan pariwisata yakni dengan memanfaatkan potensi budaya sebagai ciri khasnya dengan kondisi alam menyebabkan perbedaan dan karakteristik potensi lokal antar daerah yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat pentingnya peran pariwisata yang kemudian dalam pengembangan masyarakat, pemerintah menunjang pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Hal ini disebabkan wisata berpengaruh terhadap tiga perspektif menurut (Jamalina & Wardani, 2017) menyebutkan diantaranya yaitu segi ekonomi (mulai dari sumber devisa, pajak, dll), segi sosial (menciptakan lapangan pekerjaan) dan segi budaya (pelestarian budaya dan adat).

Melalui proses pengembangannya mendorong pemerintah dalam mencari konsep pengembangan wisata baru yang mengarah pada nilai-nilai dari pelestarian pada lingkungan serta budaya masyarakat, dan menunjang dalam

memberikan keuntungan bagi jangka panjang. Serta, keterlibatan langsung masyarakat lokal yang memungkinkan untuk pengembangan daerah tujuan wisata diharapkan dapat menjadi peluang yang dapat menyerap lapangan pekerjaan. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan standar hidup dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat terus meningkatkan inovasi terkait dalam Program unggulan pariwisata terhadap pemerintah saat ini yaitu pada desa wisata. Dimana mengingat selama masa pandemi, desa wisata menjadi salah satu tujuan bagi para wisatawan berkunjung. Menurut (Istoria Hidayah N, 2013).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 5.592 kunjungan wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Ntion World Tourism Organization (UNWTO). Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk daerah terbanyak jumlah kunjungan wisatawan sejak 5 tahun terakhir. Salah satunya dalam pengembangan desa wisata yang sangat baik di Indonesia. DIY selalu berupaya mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki agar tercapainya target untuk menunjang wisata. Mengingat salah satu desa wisata di Yogyakarta sudah diakui kapasitasnya baik secara Nasional maupun Internasional. Desa Wisata Jatimulyo merupakan salah satu tempat dengan keanekaragaman hayati dan budaya jawa yang masih sangat kuat. Sebagian potensi desa menjadi salah satu daya tarik wisata yang dikembangkan untuk kesejahteraan mayarakat, sekaligus dalam memberikan kontribusi kepada pengembangan pariwisata. Hal ini dapat dilihat melalui potensi desa dengan menggunakan konsep segitiga emas, yang terdiri dari keunikan alam, fenomena alam, dan budaya.

**Tabel 1.1 Data Jumlah Pengunjung Desa Wisata Jatimulyo
Tahun 2018-2022**

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung
-----	-------	-------------------

1.	2018	1.761 Orang
2.	2019	2.306 Orang
3.	2020	1.163 Orang
4.	2021	786 Orang
5.	2022	813 Orang

Sumber : Data Jumlah Pengunjung Per-Tahun Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kulon Progo

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa data jumlah pengunjung Desa Wisata Jatimulyo oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kulon Progo pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan di tahun 2019 dengan total pengunjung sebanyak 2.306 orang. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya sebanyak 813 wisatawan. Namun Desa Wisata Jatimulyo ini jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung dari 11 desa wisata lainnya di pegunungan menoreh, Desa Wisata Nglinggo dengan jumlah 26.434 dan Desa Wisata Kalibiru dengan jumlah 29.653 wisatawan. Hal ini menjadikan Desa Wisata Jatimulyo masih rendah jumlah pengunjungnya dibanding 11 desa wisata lainnya. Pada tahun 2021 desa wisata jatimulyo kurang diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini kemungkinan dikarenakan pada masa pandemi berlangsung jumlah pengunjung semakin berkurang dan setelah pandemi dari berbagai tempat wisata berlomba-lomba meningkatkan daya dengan menyediakan berbagai fasilitas dan tempat hiburan bagi masyarakat yang ingin berkunjung.

Selain itu Salah satu penyebabnya karena desa wisata jatimulyo merupakan wisata khusus dimana orang-orang yang mempunyai minat seperti wisata edukasi sejarah, obyek untuk dijadikan sebuah penelitian, dan hanya orang-orang yang

menyukai obyek desa wisata jatimulyo. Sehingga, pada tahun 2021 desa wisata jatimulyo kurang diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Oleh sebab itu, dalam pengembangan desa wisata membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan. Pengembangan desa wisata ini dilakukan guna menambah daya tarik bagi wisatawan terhadap desa wisata yang perlu dilestarikan. Sehingga dengan adanya peran dari masyarakat dalam proses pengembangan dikarenakan masyarakat yang mengetahui kebutuhan dan kondisi wilayah. Oleh karena itu, keseimbangan pada pembangunan infrastuktur yang menjadi point penting dalam mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi ekowisata pengembangannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka peneliti tertarik mengkaji tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengembangan kawasan strategis dengan fokus penelitian terkait dengan implementasi pengembangan ekowisata Desa Wisata Jatimulyo. Dalam hal ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Studi Kasus Pegunungan Menoreh Kabupaten Kulon Progo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Studi Kasus Pegunungan Menoreh Kabupaten Kulon Progo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Studi Kasus Perbukitan Menoreh Kabupaten Kulon Progo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diteliti diharapkan mampu memberikan manfaat untuk dikembangkan, sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran atau pandangan yang mana penelitian berisi mengenai implemantasi peraturan daerah tentang pengembangan kawasan strategis perbukitan menoreh. Artinya karya ini diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan ekowisata, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola ekowisata, dan masyarakat dalam kerjasama pengembangan kawasan wisata pegunungan menoreh yaitu pada Desa Wisata Jatimulyo Kabupaten Kulon Progo, serta memberi pengetahuan kepada masyarakat dalam mengembangkan aset daerah.

1.5 Studi Terdahulu

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi penelitian terdahulu dan penelitian saat ini guna untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan pada

penelitian yang hendak dilaksanakan pada penelitian yang sudah ada. Studi terdahulu merupakan suatu kajian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang diperoleh melalui berbagai sumber ilmiah yaitu skripsi, jurnal, ataupun tesis. Pada bagian ini peneliti menempatkan beberapa hasil penelitian terdahulu sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan, kemudian meringkasnya dengan disertakan nama penulis dan judul penulis untuk dapat mengetahui hasil penelitian tersebut. Berikut ini adalah studi terdahulu yang mana menjadi dasar referensi penulis untuk melakukan penelitian.

Penelitian (Sumarni, 2023). Metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengelolaan danau limboto tidak mendapatkan cukup dana. Akibatnya kebijakan yang dibuat tidak efektif dan tidak terbaik untuk memimpin kebijakan. Dan tidak ada lembaga khusus yang mengatur danau. Penelitian (Supriyatno & Maulana, 2022). Metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan dalam rangka mengatasi kemiskinan belum dilaksanakan sesuai aturan karena masih banyak penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dan masih terbatas. Sehingga peran pemerintah sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian (Syari, Sarungu, & Soesilo, n.d.) Metode Kualitatif. Hasil penelitian membahas kota Yogyakarta sudah menjalankan tugas serta wewenangnya dengan benar sesuai dengan penerapan program penataan wilayah pedestrian serta kebijakan tersebut bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan prinsipnya.

Penelitian (Kusuma, 2022). Metode Kualitatif. Berdasarkan penelitian menurut pemikiran Shinta Nuriya membahas tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran, tenaga, dan dana dalam pengembangan ekowisata di Desa Srikaton serta adanya faktor pendorong dan penghambat dalam berpartisipasi dari pola pikir masyarakat. hal ini karena adanya musyawarah dan gotong royong untuk meningkatkan ekowisata desa tersebut. Penelitian (Natsir Adzam, 2022). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian menurut pemikiran Natsir Azzam dalam penelitiannya yang membahas

terdapat 6 indikator yang berpengaruh pada pengembangan Desa Wisata yang berlandas melalui masyarakat yakni SDM, akses, sarana parasarana, iklan, pertunjukan, keikutsertaan masyarakat. Penelitian (Jamalina & Wardani, 2017). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian menurut Ismi Atikah dijelaskan bahwa dalam penelitian tersebut membahas bahwa konsep CBT pada pengembangan Desa Wisata Nglanggeran telah berhasil pada proses penerapannya. Namun faktor yang menghambat yaitu dari faktor tempat, SDM, promosi serta jumlah harga. Dan strategi yang dilakukan dengan berusaha mencegah hambatan yang terjadi.

Penelitian (Lulik Fullela Rakhman, 2023) Berdasarkan penelitian menurut pemikiran Lulik membahas terdapat empat metode kelembagaan agro-ekowisata dengan berbasis pengelolaan desa wisata diantaranya yaitu : 1) terpusat, 2) heliks, 3) pentaheliks, 4) tripelheliks dari keempat metode tersebut masing-masing mempunyai kesamaan dan kolaborasi pada sesama aktor pengelola Desa Wisata. Sehingga perbedaannya pada institusi dan antar aktor dalam oengelolaaan. Penelitian (GINTING et al., 2020). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan penelitian membahas bahwa belum adanya strategi pembangunan objek wisata di Teluk Jering, dan temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak menginginkan objek dibangun oleh pemerintah karena hal tersbeut akan mengurangi biaya pembangunan di Teluk jering dan tidak ada bukti adanya kebijakan resmi yang dijadikan dasar tindakahn hukum untuk membangun objek wisata. Kesimpulanya pemerintah belum menyusun strategi sehingga harus menyediakan askes seperti fasilitas, wi-fi, aturan penempatan objek dan lain-lain.

Penelitian (Kusuma, 2022) Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa wisata sidorejo terdapat penguat daya tarik yang terdiri dari alam dan buatan. Namun, ada beberapa masalah pengelolaan disebut demikian karena berpengaruh terhadap kepengurusan. Penelitian (Nurwanda & Setiyono, 2021). Metode penelitian kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa desa

wisata pandanrejo belum mencapai potensi maksimalnya, ada beberapa kendala termasuk tingkat pengetahuan teknologi, kurangnya investor dan permasalahan akibat pandemi. Penelitian (Setyawati & Setyowati, 2022). Metode kualitatif. Hasil penelitian membahas terdapat dua indikator penting pertama, Dinas pariwisata terus melaksanakan pembangunan pariwisata dengan berbasis CBT. Kedua, Dinas sudah melakukan perannya sebagai pemandu.

Penelitian (Kariman Sinaga, 2021). Metode penelitian kualitatif. Hasil pembahasan yaitu pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan serdadang masih terdapat kurangnya komunikasi dan koordinasi untuk setiap proses implementasi dimana penetapan kebijakan yang dilaksanakan sudah terdapat kesalahan. Penelitian (Fefri Y. Roslin, Daisy, 2023). Metode penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT. Berdasarkan penelitian menurut pemikiran Fefri hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat 3 strategi utama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan objek wisata buntu burake. Strategi ini termaksud menyediakan fasilitas, memastikan bahwa sarana dan prasarana dikembalikan, meningkatkan daya tarik fotografi di lokasi dan mendorong UMKM.

Penelitian (Kadek et al., 2023). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode dekriptif kualitatif dan analisis SWOT. Berdasarkan penelitian hasil penelitiannya membahas terdapat 4 strategi utama yang diterapkan pengembangan desa diantaranya pertama, rencana memaksimalkan pengembangan potensi pertanian. Kedua, dengan membangun perumahan dan fasilitasnya. Ketiga, rencana peningkatan kolaborasi triple helix. Keempat, mempromosikan di media sosial terkait pariwisata guna mempertahankan di era pandemi serta menerapkan protokol kesehatan. Penelitian (Triristina & Pujiyanti, 2022), Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Berdasarkan penelitian menurut pemikiran studi ini menunjukkan bahwa penggunaan CBT untuk membangun objek wisata sumber biru dapat diterima, karena tidak hanya membuat lingkungan menjadi lebih menarik dan sehat namun

juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Penelitian (Sulistiyani, 2022). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, kepala desa menggunakan beberapa cara untuk mempromosikan wisata pantai dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal, termaksud pembangunan infrastruktur, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan perekonomian masyarakat. Namun, terdapat unsur pendukung dan penghambat yang muncul pada saat kegiatan berlangsung.

Penelitian (Yusita & Duadji, 2022). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerapan prinsip CBT dalam hal ekonomi dengan menghasilkan peningkatan jumlah orang ang bekerja di sektor publik serta peningkatan standar hidup. Dalam hal ini terdapat adanya sistem yang menghentikan peningkatan sambah dan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan di sektor tersebut. Penelitian (Aeksiegaon, 2022). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa untuk membangun fasilitas pariwisata yang dibutuhkan, pokdarwis harus mampu mengoptimalkan hubungan dengan pemangku kepentingan Namun pokdarwis juga harus mengadakan pelatihan bagi pekerja harian untuk mempromosikan permasalahan kepunahan pohon bakau. Penelitian (Wiwin, 2019). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Berdasarkan pemikiran I Koping disimpulkan bahwa hasil penelitian desa wisata Penasih di Denpasar berpotensi menjadi tempat wisata unggulan. Ada kemungkinan bertahap mengubah masyarakat umum menjadi pariwisataawan atau CBT. Penelitian (Muhamad, Prihatini, Tui, & Nani, 2023). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan desa padat karya untuk menangani pengelolaan limbah domestik dan telah meningkatkan sarana dan parasarananya. Dalam pengelolaan sumber daya, pemerintah juga terus meningkatkan stakeholdernya dan memberikan pelatihan kepada masyarakatnya sehingga dapat memperoleh pemahaman mengenai air limbah. Penelitian (Ar &

Prayoga, n.d.). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil pemikiran disimpulkan bahwa terdapat kekuatan Materia Center mencakup keragaman barang, terutama varang persia dan potensinya untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat umum jika dipasarkan dengan tepat. Namun, kelemahannya tidak adanya rencana untuk kerjasama dengan usaha lain karena tingginya biaya perdana dan media yang digunakan untuk promosi yang sebgaaian besar menggunakan website desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan diantara pembahasan tersebut bahwa penerapan peraturan kawasan pegunungan menoreh untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya yang digunakan untuk mengembangkan desa wisata yang berbagai proses kebijakan telah dibuat guna mendapatkan kepentingan untuk kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat tetap berada pada posisinya untuk meningkatkan ekonomi dan devisa negara dan dengan begitu pemerintah juga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memungkinkan pengembangan daerah tujuan wisata diharapkan dapat menjadi peluang yang dapat menyerap lapangan pekerjaan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Menurut (Handoko, 2017) Implementasi merupakan proses yang dilakukan guna melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sejalan dengan sesuai dengan keputusannya sehingga menjadikan keputusan tersebut menjadi pemikiran yang operasional dan implementasi pada hakikatnya berfungsi sebagai pengingat akan apa yang harus dilakukan setelah program dilaksanakan sehingga implementasi merupakan proses pelaksanaan keputusan.

Adapun menurut (Budiman, 2015) beberapa proses tahapan yang dirinci menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :

1. Tahap pengesahan undang-undang.
2. Penunjukan keputusan pejabat pelaksana kesiapan tim untuk melancarkan suatu keputusan.
3. Terlepas benar atau tidaknya dampak nyata dari keputusan tersebut.
4. Dampak keputusan sebagai otoritas awal yang di antisipasi.
5. Kemudian Handoko menyebutkan bahwa kegiatan pelaksanaan implementasi terdiri dari beberapa hal penting : 1) Persiapan memilih jumlah daya, unit dan metodologi 2) Kebijakan penerjemahan merupakan rencana inisiatif yang dapat dilakukan. 3) Memberikan layanan dan menerima pembayaran.

b. Implementasi Kebijakan

Adapun teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward (Subarsono, 2011) dalam pendapatnya yang di uraikan dalam empat faktor diantaranya :

1. Komunikasi
Komunikasi merupakan suatu ketercapaian dari implementasi kebijakan sehingga implementor mendapatkan informasi untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan. Dimana tujuan sarannya melibatkan beberapa sasaran aktor kepentingan yang ditunjukkan.
2. Sumberdaya
Sumberdaya merupakan hal penting dalam suatu implementasi sehingga dapat mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut berupa Sumber daya Manusia, Sumber daya, sumber daya keuangan, kerjasama pihak ketiga, infrastuktur fisik dan lain-lain.
3. Disposisi

Disposisi adalah sikap atau karakter dari implementor seperti keinginan, kemauan, kejujuran memiliki sifat demokratis, serta komitmen yang jelas. Sehingga hal tersebut akan menentukan berjalannya suatu pelaksanaan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan peran yang paling berpengaruh penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Sehingga aspek dari struktur birokrasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). Struktur birokrasi yang baik dapat memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan benar.

c. Definisi Kebijakan

Menurut KBBI Kebijakan merupakan kumpulan ide dan prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar untuk rencana, kepemimpinan, dan cara bertindak. Selain individu, istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok di sektor swasta. Peraturan dan hukuman tidak sama dengan kebijakan. Kebijakan hanya sebagai pedoman untuk tindakan yang paling mungkin mencapai hasil yang diinginkan jika hukum memiliki kekuatan untuk memaksakan atau melarang suatu perilaku maka akan seperti undang-undang yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan.

Selain itu, istilah “kebijakan atau kajian” dapat merujuk pada proses yang melibatkan pengambilan keputusan penting bagi suatu penting bagi suatu organisasi dimana proses ini termasuk menentukan berbagai pilihan, seperti program atau kebijakan yang disebut sebagai langkah proses yang di buat oleh pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Jaelani,2014) disebutkan bahwa terdapat tujuh langkah-langkah dalam proses kebijakan publik diantaranya sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah, yaitu suatu proses dengan menentukan berbagai masalah atau isu. Masalah ini dapat berasal dari berbagai kegiatan,

laporan, sumber, masyarakat ataupun perubahan lingkungan seperti sosial, ekonomi dan masyarakat.

2. Agenda setting, dimana dalam agenda setting memasukan masalah ke dalam agenda kebijakan publik sehingga langkah tersebut dapat ditemukan. Namun melibatkan beberapa masalah yang harus menjadi prioritas utama.
3. Perumusan kebijakan, yaitu melibatkan pembuat gagasan dan poposal pada kebijkaan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini mencakup analisa data, komunikasi oleh ahli dan pembuatan arsip rincian kebijakan.
4. Pengambilan keputusan, yaitu kepada para pembuat kebijakan seperti pejabat pemerintah dapat mengambil keputusan hasil akhir mengenai kebijakan. Sehingga proses dapat diperbincangkan, negosiasi dan pemungutan suara.
5. Implementasi, merupakan langkah dimana menerapkan kebijakan setelah disetujui. Hal ini mencakup beberapa tindakan seperti peneraan kebijakan, mengatur anggaran, mengubah prosedur operasional.
6. Evaluasi, yaitu suatu langkah yang dilakukan utnuk mengetahui apakah kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat dan apakah tujuan mereka telah dicapai. Sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang baru.
7. Pengawasan, dimana pengawasan berlanjut utnuk memastikan bahwa itu diterapkan dengan benar sesuai dengan tujuannya.

1.6.2 Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Menurut Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang “Penataan Ruang” dijelaskan bahwa Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan dengan menetapkan standar, pola dan prinsip dan standar untuk pengelolaan tata ruang dan wilayah serta pengendalian pemanfaatan ruang

dan wilayah yang berkelanjutan. Ini mencakup bagaimana pemerintah daerah menyelenggarakan, membangun, dan mengawasi pemanfaatan ruang dan wilayah tersebut.

Menurut (Abdul Hakim, 2012) Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah suatu perencanaan yang dimaksud untuk memenuhi jangka panjang yang mana mencakup semua aspek tata ruang dan wilayah termaksud tata guna lahan, permukiman, transportasi dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk merencanakan pertumbuhan dan pertambahan serta untuk perkembangan wilayah secara berkelanjutan. RTRW sangat dibutuhkan bagi upaya untuk mengatur pembangunan wilayah secara terorganisir dan penggunaan lahan sehingga dapat membantu meminimalisir terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta mendukung pelestarian lingkungan. Penjelasan konsep rencana tata ruang dan wilayah yang dimaksud Abdul Hakim diantaranya yaitu :

1. Tata Guna Lahan

Tata guna lahan merupakan suatu perencanaan yang memanfaatkan suatu lahan yang di suatu wilayah baik itu lingkup (nasional, lokal maupun regional) untuk tujuan tertentu. Diantaranya meliputi beberapa pemilik tanah, ketersediaan tanah, peruntukan tanah Selain itu juga terdapat beberapa komunikasi langsung antara jenis ataupun tingkatan tata guna lahan dengan cara menawarkan beberapa tempat fasilitas transportasi yang tersedia. salah satu tujuannya yaitu untuk perencanaan bagi setiap tata guna lahan dan sistem transportasi untuk menjadi antara aktifitas tata guna lahan dengan kemampuan transportasi.

2. Permukiman

Permukiman merupakan suatu area dimana manusia tinggal, berkumpul, melakukan kegiatan sehari-hari seperti istirahat, makan,

berinterkahi dan bekernya. Hal ini yang terbentuk karena buatan manusia atau alami dengan segala perlengkapan yang digunakan untuk tempat tinggal manusia. Permukiman terdapat berbagai jenis penggunaan lahan seperti pemukiman perkotaan, pemukiman pedesaan, dan pemukiman pinggiran kota (Harjo Purnomo, 2016).

3. Transportasi

Menurut (Wahab, 2008) Transportasi merupakan suatu kegiatan proses pemindahan barang penumpang ataupun informasi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan wahana atau mesin yang digerakan oleh manusia. Transportasi digunakan untuk dapat memudahkan manusia dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Terdapat beberapa jenis transportasi diantaranya transportasi darat, udara, air, kereta, ruang angkasa dan lain-lain. Alat yang mendukung untuk proses perpindahan tergantung pada :

- Bentuk objek yang ingin dipindahkan.
- Jarak dari suatu tempat ke tempat lain,
- Tujuan dari objek yang ingin dipindahkan.

4. Lingkungan

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang mengacu pada kualitas kehidupan sekitar manusia yang dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup termasuk tingkah laku beserta perbuatannya. Hal ini mencakup pada alam, makhluk hidup, ekosistem, manusia serta interaksi antar sesama manusia. Lingkungan terdiri dari beberapa aspek mengenai lingkungan diantaranya yaitu konservasi lingkungan, pencemaran lingkungan, keberlanjutan lingkungan, perubahan iklim, kehidupan liar, penggunaan lahan, kualitas udara dan air, teknologi lingkungan dan pendidikan lingkungan.

1.6.3 Ekowisata

Menurut (Handayani, 2009) mendefinisikan ekowisata sebagai model wisata alam yang bertanggungjawab untuk menikmati keindahan alam dengan melibatkan beberapa elemen pendidikan dan mendukung upaya konservasi serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Sementara, (Menurut Hanifa, 2017) ekowisata adalah suatu konsep yang mengaitkan pariwisata dengan konservasi. Hal ini disebabkan bahwa ekowisata sebagai jenis pariwisata yang mengutamakan tanggung jawab wisatawan terhadap lingkungan dan merupakan bentuk pariwisata yang berwawasan lingkungan. Menurut (Subandi, 2015) mendefinisikan ekowisata sebagai jenis wisata yang dapat berfokus pada wisata alam pedesaan dan budaya sebagai jenis wisata berbasis alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan di atas, ekowisata dapat di lihat dari tiga perspektif, yakni:

1. Ekowisata sebagai produk
Ekowisata sebagai produk artinya ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumber alam.
2. Ekowisata sebagai pasar,
Ekowisata sebagai pasar artinya ekowisata merupakan perjalanan yang di arahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan.
3. Ekowisata sebagai pendekatan pengembangan
Suatu pembudidayaan dan pengelolaan wisata dengan melihat objek lingkungan.

Menurut (Sri, 2016) Ekowisata merupakan lingkungan yang dapat menghasilkan suatu cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata. Dalam pembangunan ekowisata sebaiknya harus memantau pelestariannya terlebih dahulu. Dengan adanya pemantauan tersebut dapat

mengurangi kerusakan terhadap lingkungan yang diakibatkan melalui limbah pembangunan yang berlebihan sehingga pemanfaatan ekowisata yang berkelanjutan dan pembangunan tersebut dapat berguna dimasa sekarang untuk dipelihara. Namun tidak hanya dimasa depan melainkan dapat dirasakan dan dimanfaatkan untuk masa yang akan datang.

(Azzhar, 2010) menyebutkan terdapat beberapa batasan ekowisata yakni : 1) wisata alam yang bertujuan untuk usaha melestarikan lingkungan dan perekonomian. Kemudian, membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat lokal dan meberikan edukasi terhadap wisatawan. Kriteria serta prinsip dari ekowisata harus terdiri dari tanggung jawab, kepedulian serta komitmen kuat pada pelestarian lingkungan dan budaya pada pengembangannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga ekowisata diharapkan memberikan dampak positif pada masyarakat karena dapat membuka lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan masyarakat.

1.6.4 Tata Ruang Ekowisata

Menurut (Sarjono, 2010) Tata ruang ekowisata merupakan suatu pendekatan perencanaan tata ruang dengan tujuan untuk mengelola dan melestarikan wilayah alam yang memiliki nilai ekologis serta dapat memungkinkan untuk wisata berkelanjutan yang memberikan untuk masyarakat setempat. Sehingga demikian konsep tata ruang ekowisata menyatukan berbagai prinsip pelestarian alam, nilai ekowisata serta pengembangan tata ruang ekowisata agar menjadikan suatu wisata yang dapat mempertahankan ekosistem keindahan alam yang terjaga dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat dan bagi industri pariwisata. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang dari tata ruang ekowisata diantaranya :

a. Konservasi Lingkungan

Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan yang merupakan prinsip utama dalam tata ruang ekowisata hal ini terdiri dari pelestarian ekosistem alam yang rentan, pemantauan kondisi lingkungan dan pemeliharaan spesies yang terancam punah.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat setempat sangat penting dalam pelibatan perencanaan dan pengelolaan ekowisata hal ini karena masyarakat setempat menjadi pelaku utama dalam memantau dan mempertahankan lingkungan serta dapat keuntungan ekonomi dan pariwisata.

c. Zonasi

Tata ruang ekowisata sering kali membagi area dengan berbeda zona dan tingkat perlindungan yang beragam. Dimana zona tersebut terdiri dari zona inti, merupakan tempat yang dilindungi dan hanya dapat diakses oleh izin persetujuan kemudian zona penyangga yang mungkin aksesnya sangat terbatas, serta zona pengembangan yang berisi fasilitas wisata yang lengkap.

d. Pengelolaan Pengunjung

Tata ruang ekowisata harus melibatkan pengelolaan seperti lalu lintas bagi pengunjung agar mengurangi dampak negatif pada ekosistem. Hal tersebut termasuk pembatasan maksimal pengunjung atau mengarahkan jalur hiking dan penggunaan.

e. Pengembangan Berkelanjutan

Tata ruang ekowisata mengarah pada pengembangan berkelanjutan yang mana di dalam tata ruang sendiri untuk mempertimbangkan jangka panjang dari pariwisata terhadap lingkungan sosial, dan ekonomi.

f. Edukasi Lingkungan

Fasilitas ekowisata biasanya mengutamakan pendidikan dan kesadaran akan lingkungan bagi pengunjung. Hal ini dapat membantu untuk

meningkatkan pemahaman tentang lingkungan serta kebutuhan dalam pelestariannya.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan secara detail bagaimana permasalahan yang ingin ditulis. Definisi Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Teori Implementasi”

1.7.1 Implementasi

Teori ini mengatakan bahwa indikator pendekatan teoritis yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan, program, atau proyek dalam konteks pemerintahan, organisasi, atau sektor lainnya. Implementasi mengacu pada pencapaian tujuan yang di ditujukan dalam suatu keputusan dengan mengarah pada tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan atau tindakan dalam upaya untuk mengubah keputusan tersebut menjadi tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

1.7.2 Perencanaan Tata Ruang Dan Wilayah

Rencana Tata Ruang dan Wilayah mengarah pada suatu perencanaan yang dimaksud untuk memenuhi jangka panjang yang mana mencakup semua aspek tata ruang dan wilayah termaksud tata guna lahan, permukiman, transportasi dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk merencanakan pertumbuhan dan pertumbuhan serta untuk perkembangan wilayah secara berkelanjutan.

1.7.3 Pengembangan Ekowisata

Pengembangan Ekowisata dari definisi konseptual ini mengacu pada suatu jenis dari pariwisata yang mana berfokus pada bagaimana pelestarian lingkungan sekitar dan budaya yang melekat didalamnya serta terdapat manfaat untuk masyarakat seperti manfaat ekonomi, sosial dan budaya serta pendidikan pada masyarakat lokal sehingga dapat di kembangkan dengan baik. Pengembangan ekowisata merupakan suatu kegiatan pemanfaatan suatu tempat dengan mengarah pada program yang sudah dibuat dalam pembangunan berkelanjutan pariwisata alam yang terdiri dari pembudidayaan tempat sesuai pada asas yang berlaku untuk memanfaatkan ruang melalui akomodasi secara seluruh sesuai dengan kegunaan secara terarah dan dapat menghasilkan untuk pembangunan keberlanjutan pariwisata.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk untuk menjelaskan ide-ide yang konkret dan terukur. Dengan demikian definisi ini menjelaskan prosedur praktik atau perasional untuk mengukur atau mengamati ide-ide tersebut dalam penelitian. Berikut ini definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1.2 Definisi Operasional

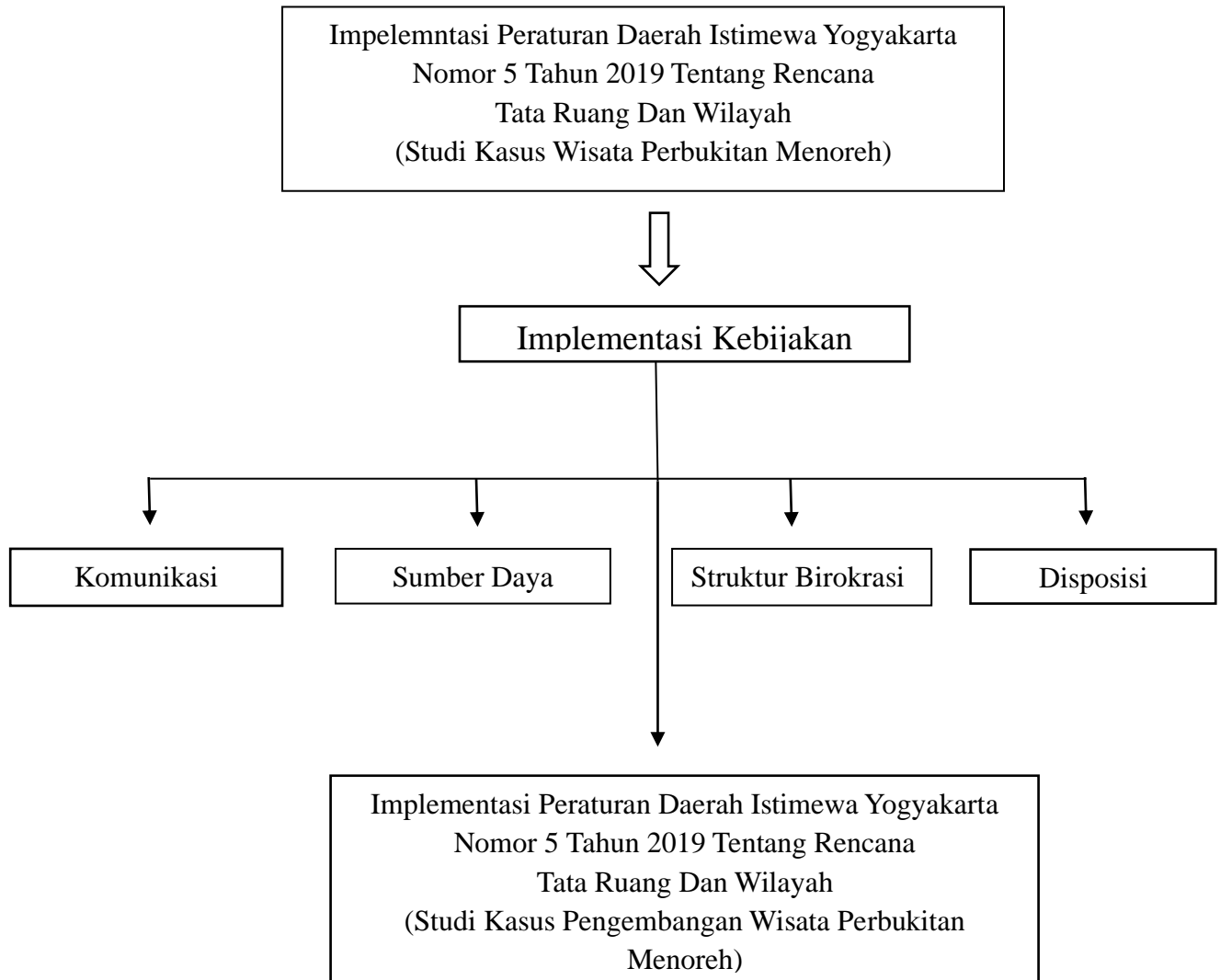
Variabel	Indikator	Parameter
Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah	A. Komunikasi	- Kejelasan Koordinasi : menangkap informasi - Konsistensi dalam : pesan jelas - Komunikasi : pesan, ide, gagasan
(Studi Kasus	B. Sumber Daya	- Ketersediaan SDM :

Pengembangan Wisata Pegunungan Menoreh)		kemampuan masyarakat - Kewenangan : hak - Pelatihan pemberdayaan masyarakat : melatih kemampuan - Stakeholder : pihak terkait - Informasi : Sumber - Sarana dan Prasarana : pendukung
	C. Disposisi	Disposisi : sikap, karakter, sifat
	D. Struktur Birokrasi	- Organisasi - Standar Operasional Prosedur

1.9 Alur Pikir Penelitian

Pada penelitian ini penulis membuat proses alur pemikiran yang berfokus untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 terkait pengembangan wisata pegunungan menoreh dan melihat bagaimana keberhasilan pemerintah dalam membina masyarakat untuk mengembangkan potensi desa yang dituangkan kedalam gambar yang dijelaskan dibawah ini :

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir



1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus mengenai implementasi kebijakan. Menurut (Sugiyon, 2018) metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang berlandaskan melalui filsafat dimana

digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen sebagai instrumen. Dimana pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau kejadian secara mendalam dan memungkinkan bagi peneliti untuk dapat mengeksplorasi konsep-konsep mengenai strategi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan ekowisata, praktik pengembangan, penyebab dari dukungan serta hambatan agar proses pengembangan ekowisata berjalan dengan baik. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengembangan kawasan strategis dengan fokus penelitian terkait dengan pengembangan ekowisata.

1.10.2 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertanyaan, responden atau informan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara, observasi serta dokumentasi kepada narasumber yang mengetahui topik dari permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer disini adalah hasil wawancara oleh pejabat atau staff Dinas Pariwisata Kulonprogo, hasil wawancara masyarakat lokal dan Pokdarwis yang terdapat di desa wisata jatimulyo, Hasil wawancara dengan pengelola desa wisata jatimulyo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber kepustakaan dimana data ini berupa dokumen-dokumen, surat kabar, internet, journal ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber arsip, dokumen pribadi dan lain sebagainya yang dibutuhkan pada data penelitian yang dilakukan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen terkait pengembangan ekowisata, website Dinas Pariwisata, jurnal yang terkait dengan topik penelitian.

1.10.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data diantaranya yaitu dengan proses wawancara, observasi dan dokumentasi guna memperoleh data yang sesuai dengan topik permasalahan. Penjelasan teknik pengumpulan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan percakapan antara dua orang atau lebih dengan melakukan tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan dilakukan secara tatap muka antara narasumber dengan pewawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, dimana wawancara berlangsung dengan menggunakan wawancara terbuka. Penulis menentukan sasaran wawancara, membuat jadwal wawancara dan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Namun, pertanyaan yang disampaikan tidak harus sama persis dengan pedoman sehingga terdapat kemungkinan ada variasi sesuai data yang ingin didapatkan oleh pewawancara.

Adapun yang menjadi data informan utama dalam penelitian yaitu pejabat/staff Dinas Pariwisata Kulonprogo masyarakat lokal dan

Pokdarwis yang terdapat di desa wisata jatimulyo, pengelola desa wisata jatimulyo.

Tabel 1.3 Narasumber Penelitian

No.	Nama	Institusi	Jabatan
1.	Bapak Tsapto Nugroho	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo	Fungsional Sarana Prasrana Pariwisata
2.	Bapak Mardyanta	Pemerintahan Kalurahan Jatimulyo Kulon Progo	Carik Pemerintah Kalurahan Jatimulyo
3.	Bapak Rudi Hastaryo	Kelompok Sadar Wisata	Anggota kelompok sadar wisata

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut (Sugiono, 2018) observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Adapun yang menjadi teknik dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi partisipatif dimana penulis terlibat dalam pengamatan secara langsung dengan obyek penelitian dilapangan. Observasi dilakukan dengan pengamatan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh dinas Pariwisata kulon Progo terhadap pengembangan Desa Wisata Jatimulyo.

Tabel 1.4 Catatan Lapangan Hasil Observasi

Observasi	Data/ Hasil Pengamatan
Pengamatan infrastuktur jalan desa jatimulyo	Untuk jalan menuju desa wisata jatimulyo terdapat rambu-rambu petunjuk arah bagi wisatawan pengunjung.
Pengamatan Produk Desa Wisata Jatimulyo	Untuk produk wisata peneliti mengunjungi beberapa tempat yaitu Sungai Mudal dan Goa Kiskendo.
Pengamatan Tempat Wisata	Penulis mewawancarai salah satu pengelola yang bertepatan di goa kiskendo yang sedang dalam proses pengembangan beberapa tempat yaitu taman wisata dan fasilitas lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada dimana data digunakan untuk menggali informasi yang terjadi dimasa lampau secara historis atau dokumen yang lalu untuk menunjang data penelitian. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa mengumpulkan buku-buku pendapat, peraturan undang-undang, teori, buku, thesis, jurnal, berita yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.10.4 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut (Sugiono, 2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam

unit-unit, melakukan sintesam menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Terdapat tiga teknik analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan memilih data atau informasi hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari lapangan mengenai bagaimana Implementasi Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengembangan kawasan strategis Pegunungan Menoreh dengan fokus penelitian terkait dengan pengembangan ekowisata Desa Wisata Jatimulyo. data yang didapat melalui wawancara wawancara, observasi, dan dokumentasi masing-masing ringkas dan dipilih dan fokus yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafik dimana penyajian dibuat dengan bentuk uraian, bagan, tabel dan hubungan antar kategori sehingga penyajian data akan tersusun dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses analisis data atau informasi yang didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Sehingga jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan yang di teliti dalam penelitian ini.